

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan

2.1.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hasil dari usaha yang dapat diukur dengan indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja misalnya peningkatan penjualan, peningkatan modal, peningkatan keuntungan, peningkatan aset dan ukuran perusahaan. (Felício *et al.*, 2014, dikutip dalam Sinarwati & Prayudi, 2021)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan bisa menggambarkan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang telah dimiliki. Kinerja keuangan adalah suatu media untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan dapat menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai alat penilaian bagi manajemen untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam mengelola modalnya secara efektif dan efisien demi mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula kondisi perusahaan.

2.1.2 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Setiap entitas memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk kelangsungan entitas maupun untuk kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mengelola entitas demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebuah pencapaian bagi manajemen. Pencapaian atau kinerja suatu entitas dapat diukur sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dari internal manajemen maupun dari pihak eksternal.

Manfaat penilaian kinerja menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (2014) adalah:

- 1) untuk mengetahui kinerja kuantitatif yaitu kinerja keuangan dan kinerja pengelolaan dana bergulir;
- 2) untuk mengetahui kinerja kelembagaan yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan pinjaman;
- 3) untuk membuat kategorisasi penilaian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang standar secara nasional dan sesuai dengan kelembagaan program; dan
- 4) untuk memberikan informasi yang standar tentang kondisi UPK kepada pihak lain yang akan bekerja sama atau membentuk jaringan dengan UPK.

Penilaian kinerja keuangan suatu entitas berfungsi untuk menunjukkan kepada para investor atau masyarakat umum bahwa entitas memiliki kredibilitas yang baik. Kredibilitas yang baik akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya

dan mendorong para pelanggan untuk menggunakan produk yang disediakan entitas.

2.1.3 Tahap-tahap dalam Melakukan Penilaian Kinerja Keuangan

Proses penilaian kinerja keuangan melibatkan banyak indikator yang ada dalam laporan keuangan. Fahmi (2012) mengungkapkan tahapan dalam menilai kinerja keuangan suatu entitas adalah sebagai berikut.

- 1) Meninjau laporan keuangan dengan tujuan untuk memastikan apakah laporan keuangan yang telah dibuat tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku umum.
- 2) Melakukan perhitungan dengan disesuaikan pada kondisi dan permasalahan yang sedang diteliti.
- 3) Dari hasil perhitungan tersebut, dilakukan perbandingan dengan hasil perhitungan lain. Metode dalam melakukan perbandingan keuangan meliputi:
 - a. *Time series analysis*, yaitu metode perbandingan secara antarwaktu atau periode.
 - b. *Cross sectional approach*, yaitu metode perbandingan yang dilakukan terhadap hasil perhitungan rasio keuangan dari perusahaan-perusahaan dalam lingkup bisnis yang sejenis secara bersamaan.
- 4) Melakukan interpretasi terhadap berbagai permasalahan dan kendala yang dialami entitas tersebut.
- 5) Mencari dan membuat solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. (Fahmi, 2012)

Kasmir (2016) mengungkapkan bahwa laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan, untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan yang dipublikasikan dibuat satu tahun sekali.

2.2.1 Neraca Microfinance

Neraca *microfinance* merupakan laporan posisi keuangan yang menggambarkan jumlah aktiva dan pasiva entitas layanan keuangan pada saat tertentu sesuai dengan penggolongannya. Bagian aktiva dari neraca *microfinance* meliputi saldo *cash on hand*, kas di bank, saldo pinjaman, biaya dibayar dimuka, inventaris, dan aktiva lain-lain.

Bagian pasiva berisi utang, modal alokasi, modal lain-lain, surplus/defisit ditahan, dan surplus/defisit berjalan. Utang adalah liabilitas atau sumber dana yang berasal dari pinjaman, baik berupa jangka pendek dan menengah atau panjang, yang harus dikembalikan. Modal alokasi adalah sumber dana awal yang dialokasikan

untuk kegiatan *microfinance*, yaitu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan SPP awal ditambah dengan 2% dana BLM. Modal lain-lain adalah komponen sumber dana lain yang dapat dikategorikan sebagai modal. Surplus/defisit ditahan adalah jumlah surplus/defisit yang digunakan untuk penambah modal yang berasal dari hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Surplus/defisit berjalan adalah jumlah surplus/defisit yang terjadi dalam periode laporan keuangan.

2.2.2 Laporan Laba/Rugi Microfinance

Laporan laba/rugi *microfinance* adalah laporan pendapatan dan biaya atas kegiatan yang dijalankan pada periode tertentu sehingga menghasilkan laba atau rugi. Laporan ini terdiri dari tiga pos utama yaitu pendapatan, biaya, dan laba/rugi. Pos pendapatan terdiri dari pendapatan operasional, pendapatan non-operasional, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa atas saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan bunga bank yang diperoleh dari rekening yang dimiliki oleh UPK. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan selain pendapatan operasional maupun non-operasional, misalnya denda, penjualan inventaris, atau penjualan hadiah.

Pos biaya terdiri dari biaya dana, biaya operasional, biaya penghapusan pinjaman, dan biaya non-operasional. Biaya dana adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan sumber dana atau modal kerja untuk pendanaan pinjaman. Biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan UPK dalam pengelolaan dana bergulir secara langsung, misalnya honor, administrasi dan

umum, transpor, sewa kantor, dan penyusutan. Biaya penghapusan pinjaman merupakan realisasi penghapusan pinjaman yang dikeluarkan oleh UPK pada periode tersebut. Biaya non-operasional adalah seluruh pengeluaran biaya yang tidak termasuk dalam golongan tersebut.

Laba/rugi adalah hasil pengurangan biaya terhadap pendapatan. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya maka disebut laba, jika sebaliknya disebut rugi.

2.3 Rasio Keuangan

Subramanyam dan Wild (2010) menyebutkan bahwa ada beberapa alat yang dapat membantu dalam menganalisis laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, salah satunya yaitu analisis rasio. Analisis rasio (*ratio analysis*) menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas. Rasio dapat digunakan untuk menggambarkan baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.

Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014 menerbitkan PTO sebagai pedoman dalam menjalankan PNPM Mandiri Perdesaan. PTO ini terdiri dari bagian utama dan 14 bagian penjelasan. Di bagian Penjelasan X terdapat standar penilaian khusus untuk menilai kesehatan UPK sebagai pengelola dana bergulir. Model rasio keuangan yang ada dalam standar penilaian ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan BUMDesma Pogalan Rahayu yang merupakan transformasi dari UPK di Kecamatan Pogalan. Penilaian kinerja keuangan menurut PTO PNPM 2014 terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek pengelolaan pinjaman dan aspek pengelolaan keuangan.

2.3.1 Aspek Pengelolaan Pinjaman

Penilaian aspek pengelolaan pinjaman bertujuan untuk memproyeksikan prospek pinjaman yang dikelola UPK di masa mendatang. Rasio yang digunakan ada empat, yaitu :

- 1) Rasio pertumbuhan permodalan, yang diperoleh dengan menghitung seluruh saldo pinjaman ditambah dana perguliran (kas dan bank) saat penilaian dibagi dengan pinjaman dan dana perguliran tahun lalu.
- 2) Rasio pertumbuhan kelompok, yang diperoleh dengan menghitung jumlah kelompok peminjam/pemanfaat saat penilaian dibagi dengan jumlah kelompok peminjam/pemanfaat tahun lalu.
- 3) Rasio tingkat pengembalian, yang diperoleh dari perbandingan realisasi pengembalian tahun berjalan dengan target pengembalian yang direncanakan.
- 4) Rasio risiko pinjaman, yang diperoleh dari cadangan risiko pinjaman dibagi dengan total jumlah pinjaman.

Tabel II.1 Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

Tingkat Kolektibilitas	Keterangan	Cadangan Resiko Penghapusan
Kolektibilitas I	Tanpa tunggakan	1%
Kolektibilitas II	Angsuran menunggak 1 s/d 2 kali	10%
Kolektibilitas III	Angsuran menunggak 3 s/d 4 kali	25%
Kolektibilitas IV	Angsuran menunggak 5 s/d 6 kali	50%
Kolektibilitas V	Angsuran menunggak diatas 6 kali	100%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

Penggolongan pinjaman menurut PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014) atas dana bergulir dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitas pinjaman. Tabel II.1 menyajikan klasifikasi keadaan pembayaran angsuran pokok oleh nasabah dan

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah disalurkan. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) digolongkan berdasarkan berapa kali penunggakan angsuran yang telah terjadi. Penggolongan ini bertujuan untuk menghitung jumlah cadangan risiko pinjaman yang ditanggung selama periode berjalan.

Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa baik entitas dalam mengelola dana pinjaman berdasarkan beberapa aspek penilaian. Tabel II.2 membagi kategori pengelolaan pinjaman SPP menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.2 Kategori Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Pertumbuhan permodalan	lebih dari 10%	5% s/d 10%	kurang dari 5%
Pertambahan jumlah kelompok /pemanfaat	lebih dari 10%	5% s/d 10%	kurang dari 5%
Tingkat pengembalian	lebih dari 80%	60% s/d 80%	kurang dari 60%
Rasio risiko pinjaman	kurang dari 20%	20% s/d 40%	lebih dari 40%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.2 Aspek Pengelolaan Keuangan

Penilaian aspek pengelolaan keuangan meliputi penilaian seluruh sistem dalam pengelolaan keuangan usaha yang mencakup proses perencanaan, pelaporan, dan hasil pengelolaan. Penilaian aspek ini menekankan pada kesiapan UPK dalam mengelola keuangan program atau proyek di kemudian hari. Penilaian ini didasarkan pada pengelolaan transaksi keuangan yang normatif dengan standar minimal.

2.3.2.1 Rasio Pendapatan

Pendapatan yang dihasilkan Unit Pengelola Kegiatan dapat dinilai menggunakan perbandingan pendapatan dengan pos lain di laporan keuangan.

Rasio pendapatan terdiri dari dua aspek penilaian, yaitu :

1. Perbandingan pendapatan jasa pinjaman terhadap saldo pinjaman.

Rasio ini diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan jasa pinjaman dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun). Saldo pendapatan kemudian dibagi dengan rata-rata pada saldo pinjaman akhir bulan dalam tahun berjalan.

2. Perbandingan total pendapatan terhadap saldo pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan menjumlahkan total pendapatan yang terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional selama satu tahun. Saldo pendapatan ini kemudian dibagi dengan saldo pinjaman yang disalurkan kepada nasabah.

Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa baik UPK dalam menghasilkan pendapatan dalam satu tahun. PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014) membagi kategori rasio pendapatan UPK menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.3 Kategori Penilaian Rasio Pendapatan

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Pendapatan jasa pinjaman terhadap saldo pinjaman dalam satu tahun	lebih dari 20%	10% s/d 20%	kurang dari 10%
Total pendapatan terhadap saldo pinjaman dalam satu tahun	lebih dari 30%	20% s/d 30%	kurang dari 20%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.2.2 Rasio Biaya

Biaya yang dikeluarkan UPK dapat dinilai menggunakan perbandingan biaya dengan pos lain di laporan keuangan. Rasio biaya terdiri dari empat aspek penilaian, yaitu :

1. Perbandingan biaya operasional terhadap saldo pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan membagi biaya operasional dengan saldo pinjaman. Biaya operasional yang dikeluarkan dijumlahkan seluruhnya dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) selanjutnya dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman pada akhir bulan dalam satu tahun.

2. Perbandingan total biaya terhadap saldo pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan membagi total biaya terhadap saldo pinjaman. Biaya operasional dan non-operasional yang dikeluarkan selama tahun berjalan dijumlahkan seluruhnya (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman pada akhir bulan dalam satu tahun.

3. Perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan jasa pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan menjumlahkan biaya operasional dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan total jasa pinjaman dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

4. Perbandingan total biaya terhadap total pendapatan

Rasio ini diperoleh dengan menjumlahkan total biaya, yang terdiri dari komponen biaya operasional dan non-operasional dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan total pendapatan, baik operasional dan non-operasional, dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa baik UPK dalam mengelola biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun. Tabel II.4 membagi kategori rasio biaya UPK menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.4 Kategori Penilaian Rasio Biaya

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Biaya operasional terhadap saldo pinjaman	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Lebih dari 50%
Total biaya terhadap saldo pinjaman	Kurang dari 30%	30% s/d 50%	Lebih dari 50%
Biaya operasional terhadap pendapatan jasa pinjaman	Kurang dari 50%	50% s/d 75%	Lebih dari 75%
Total biaya terhadap total pendapatan	Kurang dari 60%	60% s/d 80%	Lebih dari 80%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.2.3 Rasio Laba/Surplus

Rasio laba/surplus terdiri dari tiga aspek penilaian, yaitu :

1. Perbandingan surplus operasional terhadap saldo pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan menghitung laba/surplus operasional dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman akhir bulan dalam satu tahun.

2. Perbandingan surplus akhir terhadap saldo pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan menghitung laba/surplus akhir, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya dalam satu tahun kemudian dibagi rata-rata saldo pinjaman dalam satu tahun.

3. Perbandingan surplus akhir terhadap total pendapatan

Rasio ini diperoleh dengan menghitung laba/surplus akhir, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya dalam satu tahun (disetarakan dalam satu

tahun) kemudian dibagi total pendapatan, baik operasional dan non-operasional dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa baik UPK dalam menghasilkan laba dalam satu tahun. Tabel II.5 membagi kategori rasio laba/surplus UPK menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.5 Kategori Penilaian Rasio Laba/Surplus

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Surplus operasional terhadap saldo pinjaman	lebih dari 20%	10% s/d 20%	kurang dari 10%
Surplus akhir terhadap saldo pinjaman	lebih dari 10%	5% s/d 10%	kurang dari 5%
Surplus akhir terhadap total pendapatan	lebih dari 15%	10% s/d 15%	kurang dari 10%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.2.4 Efektifitas Pengelolaan Dana

Efektifitas pengelolaan dana dinilai dengan menggunakan tiga rasio, yaitu rasio saldo kas terhadap saldo pinjaman, rasio saldo bank terhadap saldo pinjaman, dan nilai pembelian inventaris dalam satu tahun terhadap surplus operasional.

Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa efektif UPK dalam mengelola dana bergulir. Tabel II.6 membagi kategori efektifitas pengelolaan dana UPK menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.6 Kategori Penilaian Efektifitas Pengelolaan Dana

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Saldo kas terhadap saldo pinjaman	kurang dari 3%	3% s/d 5%	lebih dari 5%
Saldo bank terhadap saldo pinjaman	kurang dari 10%	10% s/d 20%	lebih dari 20%
Nilai pembelian inventaris terhadap surplus operasional	kurang dari 5%	5% s/d 10%	lebih dari 10%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.2.5 Risiko Pinjaman

Penilaian risiko pinjaman menggunakan tiga macam rasio, yaitu :

1. Risiko pinjaman dibandingkan dengan pendapatan satu tahun

Rasio ini diperoleh dengan menghitung nominal risiko pinjaman dari laporan kolektibilitas dibagi dengan total pendapatan dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

2. Perbandingan realisasi biaya penghapusan terhadap risiko pinjaman

Rasio ini diperoleh dengan menghitung total realisasi biaya penghapusan dalam satu tahun kemudian dibagi dengan risiko pinjaman.

3. Perbandingan realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan

Rasio ini diperoleh dengan menghitung total realisasi biaya penghapusan dalam satu tahun kemudian dibagi dengan total pendapatan dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa besar risiko pinjaman yang disalurkan UPK pada tahun berjalan. Tabel II.7 membagi kategori risiko pinjaman UPK menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.7 Kategori Penilaian Risiko Pinjaman

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Risiko pinjaman dibandingkan dengan pendapatan satu tahun	kurang dari 25 %	25% s/d 50 %	lebih dari 50%
Realisasi biaya penghapusan terhadap risiko pinjaman	kurang dari 25 %	25% s/d 50 %	lebih dari 50%
Realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan	kurang dari 5 %	5% s/d 10%	lebih dari 10%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.2.6 Alokasi laba/surplus.

Penilaian alokasi laba/surplus dihitung menggunakan persentase laba/surplus yang ditahan untuk tambahan modal dibagi dengan total laba/surplus. Berdasarkan rasio yang telah dihitung, dapat diketahui seberapa baik UPK dalam mengalokasikan laba/surplus untuk menambah modal operasional. Tabel II.7 membagi kategori alokasi laba/surplus UPK menjadi tiga, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang.

Tabel II.8 Kategori Penilaian Risiko Pinjaman

Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
Alokasi tambahan modal terhadap keuntungan	lebih dari 50%	25% s/d 50%	kurang dari 25%

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.3.3 Penilaian Kesehatan

Setelah dilakukan analisis penilaian kinerja keuangan, selanjutnya dapat diketahui nilai kesehatan UPK dilihat dari aspek kuantitatifnya. Adapun langkah-langkahnya yang telah dijelaskan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014) adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penilaian indikator kemudian menjumlahkan untuk masing-masing aspek penilaian. Hasil penjumlahan tiap-tiap aspek dimasukkan dalam tabel total nilai pada aspek penilaian.
2. Perhitungan nilai konversi dilakukan dengan membagi total nilai dengan nilai maksimal dan hasilnya dikalikan dengan angka 100.
3. Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan pengalian nilai konversi dengan bobot penilaian masing-masing aspek penilaian.

4. Perhitungan nilai kesehatan dengan menjumlahkan nilai akhir masing-masing aspek penilaian berdasarkan Tabel II.9.

Tabel II.9 Lembar Penilaian Kesehatan UPK

Aspek Penilaian	Total nilai (a)	Nilai maksimal (b)	Nilai Konversi (c=(a/b)x100)	Bobot Penilaian (d)	Nilai Akhir (e=cxd)
Penilaian Pengelolaan Keuangan		100		50%	
Penilaian Pengelolaan Pinjaman		100		50%	
Nilai Kesehatan					

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

Kategori kesehatan UPK dapat dilihat pada Tabel II.10 yang berisi skala interval nilai yaitu, kategori sehat berada pada nilai lebih dari 75, kategori cukup sehat berada pada nilai lebih dari 60 sampai dengan 75, kategori tidak sehat berada pada nilai kurang dari 60.

Tabel II.10 Kategori Kesehatan UPK

Kategori	Nilai Aspek Kuantitatif
Sehat	Lebih dari 75
Cukup Sehat	Antara 60 s/d 75
Tidak Sehat	Kurang dari 60

Sumber: Diolah dari Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2014)

2.4 Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Indonesia

Pandemi merupakan suatu wabah yang menjangkiti banyak orang dan menyebar ke geografi yang sangat luas. Pandemi terjadi karena meluasnya penyebaran sebuah epidemi hingga ke berbagai benua dan negara. Epidemi sendiri

merupakan kondisi ketika jumlah kasus penyakit meningkat secara tiba-tiba pada suatu area tertentu.

Pada tanggal 9 Maret 2020, World Health Organization (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Pandemi Covid-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nasution dkk. (2020) menyatakan bahwa ketika terjadi pelambatan 1% pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,09%.

Berdasarkan sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19, sektor rumah tangga telah menjadi sektor yang sangat signifikan karena tidak melakukan kegiatan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi menjadi sektor yang terkena dampak dan implikasinya di sektor keuangan (Hamzah dkk., 2021). Beberapa penelitian lain yang telah dilakukan untuk menganalisis dampak Pandemi Covid-19 bagi kinerja keuangan beberapa bentuk usaha di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Rahayu dan Paramita (2021) menilai kinerja keuangan BUMDes Podho Joyo Desa Sukorejo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik selama periode 2019-2020. Dengan menggunakan aspek penilaian likuiditas, solvabilitas, dan provitabilitas, hasilnya pandemi Covid-19 menyebabkan BUMDes mengalami posisi keuangan yang kurang baik.

2. Sinarwati dan Prayudi (2021) menilai kinerja keuangan 140 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Bali selama periode 2016-2021. Dengan menganalisis peningkatan penjualan dan peningkatan modal, hasilnya pandemi Covid-19 tidak menyebabkan penurunan kinerja keuangan BUMDes. Kinerja keuangan BUMDes tetap baik meskipun di tengah pandemi Covid-19.
3. Yuliyastri dkk. (2021) menilai kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah Leuwiliang selama periode 2017-2020. Dengan menggunakan aspek penilaian likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas, hasilnya sektor simpan pinjam pembiayaan syariah mengalami kinerja keuangan yang buruk selama pandemi Covid-19.
4. Zachari dan Abdallah (2022) menilai kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci selama periode 2016-2020. Dengan menilai aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman, hasilnya pandemi Covid-19 tidak menyebabkan penurunan kinerja keuangan. Secara keseluruhan kinerja keuangan UPK SPP cukup sehat selama pandemi Covid-19.
5. Wahyudi dan Pawestri (2021) menilai kinerja keuangan Lembaga keuangan mikro syariah di Jawa Timur, yakni KSU al Ikhlas Malang (d/h BMT al Ikhlas Malang) dan Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan selama 2019-2020. Dengan menganalisis aspek permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi, hasilnya pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan kinerja lembaga keuangan mikro syariah.